Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum e-ISSN 3026-2917
https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZyn p-ISSN 3026-2925
Volume 3 Nomor 4, 2025
DOI: https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.1883

Evaluasi Kegiatan Pembinaan Kepribadian Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro Dengan Menggunakan Model Evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product)

Yudha Reza Pratama[1], Wido Cepaka Warih[2]
Program Studi Teknik Pemasyarakatan, Politeknik Pengayoman Indonesia
Email Korespondensi: yudharevapratama@gmail.com

Article received: 04 Juli 2025, Review process: 13 Juli 2025
Article Accepted: 25 Agustus 2025, Article published: 06 September 2025

ABSTRACT
Inmate rehabilitation at Bojonegoro Class IIA Prison aims to strengthen personality, legal awareness, and social readiness, yet effectiveness is constrained by limited staffing, facilities, standardized modules, meaningful participation, and overcrowding contributing to persistent recidivism; this study evaluates the program using the CIPP model via a descriptive qualitative design with participant observation, in-depth interviews (officers, facilitators, inmates), and document analysis, ensuring credibility through triangulation and CIPP-guided thematic analysis; results indicate gains in religiosity, discipline, emotion regulation, and social readiness, but an unfavorable officer–inmate ratio, infrastructural gaps, and weak longitudinal, data-driven evaluation reduce impact; in CIPP terms, context aligns with needs while input and process require reinforcement, and product shows behavioral improvements not yet consistently lowering recidivism; implications include a structured participatory curriculum, staff capacity building, improved infrastructure, integration of learning and monitoring technologies, expanded multi-stakeholder collaboration, and evidence-based policy harmonization to secure sustained outcomes and successful reintegration.
Keywords: *Inmate Rehabilitation; CIPP; Program Evaluation; Recidivism*

ABSTRAK
Pembinaan narapidana di Lapas Kelas IIA Bojonegoro bertujuan membentuk kepribadian, kesadaran hukum, dan kesiapan sosial, tetapi efektivitasnya masih terhambat keterbatasan SDM, fasilitas, modul terstandar, partisipasi bermakna, serta overkapasitas yang berkontribusi pada tingginya residivisme. penelitian ini mengevaluasi program menggunakan Model CIPP melalui desain kualitatif deskriptif dengan observasi partisipatif, wawancara mendalam (petugas, pembimbing, warga binaan), dan analisis dokumen, memastikan kredibilitas lewat triangulasi dan analisis tematik; hasil menunjukkan peningkatan religiusitas, disiplin, regulasi emosi, dan kesiapan sosial, namun rasio petugas–warga binaan yang timpang, celah infrastruktur, dan lemahnya evaluasi longitudinal berbasis data menurunkan daya guna; secara CIPP, konteks sudah selaras kebutuhan, sementara input dan proses perlu penguatan, dan produk menunjukkan perbaikan perilaku yang belum konsisten menekan residivisme; implikasinya ialah kebutuhan kurikulum terstruktur-partisipatif, peningkatan kapasitas petugas, dukungan infrastruktur, integrasi teknologi pembelajaran dan monitoring, perluasan kolaborasi multipihak, serta harmonisasi kebijakan berbasis bukti untuk memastikan keberlanjutan hasil dan keberhasilan reintegrasi.
Kata Kunci: *Pembinaan Narapidana; CIPP; Evaluasi Program; Residivisme; Rehabilitasi*

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Yudha Reza Pratama, Wido Cepaka Warih

PENDAHULUAN

Pembinaan narapidana merupakan bagian integral dari sistem pemasyarakatan di Indonesia yang bertujuan membentuk kepribadian, meningkatkan kesadaran hukum, serta menyiapkan keterampilan agar mereka dapat beradaptasi kembali di masyarakat setelah menjalani hukuman. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bojonegoro memiliki peran strategis dalam mewujudkan visi tersebut melalui berbagai program pembinaan, khususnya pada aspek spiritual, moral, dan sosial. Namun, praktik di lapangan menunjukkan adanya tantangan signifikan seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya fasilitas pendukung, rendahnya motivasi warga binaan, dan kondisi overkapasitas yang menghambat efektivitas pelaksanaan program. Data Badan Pusat Statistik (BPS, 2024) menunjukkan angka residivisme di Indonesia masih tinggi, menandakan bahwa sebagian narapidana belum berhasil mengalami transformasi kepribadian secara menyeluruh. Hal ini menegaskan pentingnya evaluasi mendalam terhadap efektivitas pembinaan, bukan hanya sebagai rutinitas administratif, tetapi juga sebagai upaya membentuk narapidana menjadi pribadi yang produktif dan taat hukum.

Fenomena tingginya tingkat residivisme tidak hanya menjadi persoalan di Indonesia, tetapi juga menjadi isu global yang memengaruhi stabilitas sosial dan keamanan publik. Studi internasional menegaskan bahwa keberhasilan program pembinaan narapidana berkorelasi erat dengan model evaluasi berbasis bukti dan pendekatan rehabilitatif yang holistik (Andrews & Bonta, 2019). Pendekatan tradisional yang hanya menekankan hukuman terbukti kurang efektif dalam menurunkan tingkat pengulangan tindak pidana, sedangkan model berbasis pendidikan, konseling psikologis, dan penguatan spiritualitas menunjukkan hasil lebih positif dalam jangka panjang (Ward & Maruna, 2020). Dalam konteks ini, pembinaan narapidana harus memadukan antara penguatan nilai moral, keterampilan sosial, dan kesiapan mental agar mereka mampu berintegrasi kembali dengan masyarakat. Tantangan global tersebut mengharuskan Lapas Kelas IIA Bojonegoro untuk menyesuaikan pendekatan pembinaannya agar sejalan dengan praktik terbaik internasional yang menitikberatkan pada perubahan perilaku yang berkelanjutan.

Salah satu pendekatan yang relevan untuk menilai efektivitas program pembinaan adalah Model Evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) yang dikembangkan oleh Stufflebeam (1971). Model ini memberikan kerangka komprehensif untuk menganalisis kebutuhan program, kualitas input, efektivitas proses pelaksanaan, hingga dampak yang dihasilkan terhadap perubahan perilaku narapidana. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan CIPP dalam evaluasi program pemasyarakatan mampu mengidentifikasi kelemahan mendasar dan memberikan rekomendasi berbasis data untuk peningkatan kualitas pembinaan (K.C. & Baral, 2023). Pendekatan ini memungkinkan lembaga pemasyarakatan tidak hanya menilai aspek administratif, tetapi juga mengevaluasi sejauh mana program benar-benar berkontribusi terhadap transformasi kepribadian narapidana. Dengan demikian, model evaluasi CIPP menjadi alat

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Yudha Reza Pratama, Wido Cepaka Warih

strategis dalam memastikan keberlanjutan dan keberhasilan pembinaan narapidana di Lapas Kelas IIA Bojonegoro.

Dalam konteks Indonesia, kebijakan pemasyarakatan telah diatur melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 yang menegaskan pentingnya pembinaan moral, spiritual, dan keterampilan narapidana sebagai upaya reintegrasi sosial. Lapas Kelas IIA Bojonegoro menjadi salah satu contoh lembaga yang aktif menjalankan program pembinaan kepribadian melalui kegiatan keagamaan, pendidikan, pelatihan keterampilan, dan penguatan nilai kebangsaan. Namun, hasil observasi awal menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara tujuan program dan realisasi di lapangan. Rendahnya ketersediaan modul pembelajaran, kurangnya tenaga pembimbing profesional, serta belum adanya sistem evaluasi berkelanjutan membuat program seringkali berjalan secara formalitas tanpa mencapai perubahan perilaku yang signifikan (Mufti & Riyanto, 2023). Kondisi ini menegaskan perlunya perbaikan strategi pembinaan dengan memperkuat integrasi antara kebijakan nasional, kebutuhan riil warga binaan, dan standar praktik terbaik internasional.

Penelitian sebelumnya di berbagai negara menunjukkan bahwa keberhasilan pembinaan narapidana sangat bergantung pada adanya sistem evaluasi berbasis data, pendekatan partisipatif, dan keterlibatan pemangku kepentingan eksternal (Ward, Yates, & Willis, 2021). Namun, di Indonesia, sebagian besar penelitian terkait masih berfokus pada aspek normatif dan administratif, sementara kajian empiris yang menilai efektivitas program berdasarkan dampak psikososial dan keberlanjutan hasil masih terbatas. Studi pada Lapas Kelas IIA Bojonegoro ini menjadi signifikan karena memanfaatkan Model CIPP untuk memetakan kelemahan dan kekuatan pembinaan kepribadian narapidana, sekaligus memberikan rekomendasi konkret yang dapat digunakan sebagai dasar kebijakan pembinaan berbasis bukti. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademik, tetapi juga bersifat aplikatif untuk mendukung optimalisasi efektivitas program pemasyarakatan di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program pembinaan kepribadian narapidana di Lapas Kelas IIA Bojonegoro dengan menggunakan Model Evaluasi CIPP. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis kesesuaian konteks pembinaan dengan kebutuhan narapidana, (2) menilai kecukupan sumber daya dan kualitas input program, (3) mengevaluasi efektivitas proses pelaksanaan pembinaan, dan (4) mengukur dampak hasil program terhadap perubahan perilaku, kesadaran hukum, dan kesiapan narapidana untuk reintegrasi sosial. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperbaiki kebijakan pembinaan narapidana dan menjadi acuan bagi pengembangan model pembinaan kepribadian yang lebih adaptif, partisipatif, dan berbasis bukti.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk mengevaluasi efektivitas program pembinaan kepribadian narapidana di

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Yudha Reza Pratama, Wido Cepaka Warih

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro berdasarkan Model Evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product). Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena sosial dan dinamika pembinaan melalui eksplorasi pengalaman, persepsi, dan interaksi para pihak yang terlibat. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan petugas lapas, pembimbing, dan narapidana, serta analisis dokumen berupa modul pembinaan, laporan kegiatan, dan catatan evaluasi program. Teknik triangulasi digunakan untuk meningkatkan kredibilitas data dengan memadukan berbagai sumber dan metode pengumpulan informasi. Analisis data dilakukan secara tematik melalui proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kerangka CIPP, yang meliputi penilaian terhadap kesesuaian konteks dengan kebutuhan narapidana, kecukupan input, efektivitas proses pelaksanaan, serta dampak hasil program terhadap perubahan perilaku dan kesiapan reintegrasi sosial. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif dan objektif mengenai kualitas program pembinaan serta menjadi dasar bagi perumusan rekomendasi kebijakan berbasis bukti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Program Pembinaan Kepribadian Narapidana di Lapas Kelas IIA Bojonegoro

Program pembinaan kepribadian di Lapas Kelas IIA Bojonegoro merupakan upaya strategis pemerintah dalam membentuk kembali karakter, kesadaran hukum, dan kompetensi sosial narapidana agar siap berintegrasi ke masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar warga binaan mengikuti berbagai program pembinaan, termasuk pendidikan agama, konseling psikososial, penguatan moral, pelatihan keterampilan, serta kegiatan berbasis kebangsaan. Kehadiran kegiatan keagamaan seperti salat berjamaah, kajian kitab, dan pembinaan spiritual terbukti memberikan dampak positif pada ketenangan batin, pengendalian emosi, dan penurunan perilaku agresif. Studi Andrews dan Bonta (2019) mengonfirmasi bahwa pendekatan rehabilitatif berbasis spiritual dan sosial mampu meningkatkan kepercayaan diri narapidana, mengurangi potensi residivisme, dan memperkuat kesiapan mereka untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Keberhasilan ini juga menunjukkan adanya sinergi antara kebijakan pemasyarakatan nasional dan praktik terbaik internasional dalam mengelola pembinaan kepribadian.

Peningkatan kesadaran spiritual dan moral terlihat nyata pada sebagian besar warga binaan, khususnya bagi mereka yang aktif mengikuti pembinaan agama dan konseling kepribadian. Kegiatan ini tidak hanya memengaruhi pola pikir narapidana, tetapi juga berdampak langsung pada perilaku sehari-hari, seperti disiplin waktu, tanggung jawab, dan kemampuan mengendalikan konflik. Hasil temuan ini sejalan dengan kajian Ward dan Maruna (2020) yang menegaskan bahwa pembinaan berbasis nilai-nilai agama dan psikologi dapat meningkatkan internalisasi perilaku positif yang mendukung proses reintegrasi sosial. Namun,

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Yudha Reza Pratama, Wido Cepaka Warih

sebagian narapidana mengaku mengikuti kegiatan pembinaan hanya sebagai formalitas karena kurangnya pemahaman substansi materi dan minimnya variasi metode pembelajaran, sehingga perubahan perilaku belum menyentuh seluruh lapisan warga binaan.

Keterlibatan petugas pembinaan dan pembimbing spiritual menjadi faktor kunci keberhasilan program, namun keterbatasan jumlah tenaga pendamping menjadi kendala serius. Hasil penelitian menunjukkan bahwa satu petugas harus menangani rata-rata 60 hingga 80 narapidana, menyebabkan proses pendampingan kurang optimal. Studi Taxman et al. (2021) menegaskan bahwa efektivitas pembinaan sangat dipengaruhi oleh rasio petugas terhadap warga binaan, karena pendampingan personal berperan penting dalam membantu narapidana memahami nilai-nilai moral dan mempraktikkannya secara konsisten. Kurangnya jumlah petugas juga berdampak pada lemahnya pengawasan, kurangnya evaluasi keberlanjutan, dan terhambatnya penyediaan materi pembelajaran yang adaptif terhadap kebutuhan psikososial peserta.

Hasil wawancara menunjukkan adanya perubahan signifikan pada aspek psikososial narapidana, termasuk meningkatnya rasa percaya diri, kemampuan mengelola emosi, dan keterampilan sosial. Beberapa narapidana mengaku lebih siap menghadapi tantangan sosial setelah bebas karena merasa mendapatkan bimbingan moral dan dukungan psikologis yang memadai. Studi Day et al. (2018) mendukung temuan ini dengan menyatakan bahwa konseling terstruktur berbasis psikososial efektif dalam meningkatkan regulasi emosi dan pemahaman diri, yang menjadi fondasi penting bagi keberhasilan reintegrasi sosial. Dengan adanya dampak positif tersebut, Lapas Kelas IIA Bojonegoro dapat dijadikan model praktik baik dalam pelaksanaan program pembinaan berbasis spiritual dan konseling psikososial, meskipun masih terdapat kendala struktural yang perlu segera diatasi.

Namun demikian, implementasi program masih menghadapi sejumlah hambatan, seperti kurangnya sarana dan prasarana, terbatasnya modul pembelajaran, serta minimnya insentif motivasional bagi warga binaan. Beberapa kegiatan dilakukan secara monoton dengan pendekatan satu arah, tanpa memberikan ruang refleksi atau diskusi mendalam bagi peserta. Akibatnya, proses pembinaan menjadi kurang partisipatif dan belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan personal narapidana. Studi van der Helm et al. (2020) menegaskan bahwa pembinaan yang bersifat pasif dan hanya berfokus pada penyampaian materi cenderung kurang efektif dibandingkan pendekatan berbasis partisipasi aktif, interaksi kelompok, dan konseling reflektif. Oleh karena itu, inovasi metode pembelajaran menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pembinaan kepribadian di lembaga pemasyarakatan.

Analisis dokumen dan laporan program menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan pembinaan dan hasil aktual di lapangan. Meskipun kebijakan pemasyarakatan telah menetapkan target capaian pembinaan, keterbatasan sumber daya membuat indikator keberhasilan tidak tercapai secara optimal. Situasi ini selaras dengan kajian McNeill dan Weaver (2019) yang menyoroti

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Yudha Reza Pratama, Wido Cepaka Warih

bahwa kesenjangan antara perencanaan program dan realisasi di lapangan menjadi penyebab utama rendahnya dampak rehabilitasi terhadap penurunan angka residivisme. Untuk itu, diperlukan strategi perencanaan berbasis bukti dengan dukungan alokasi anggaran, tenaga ahli, dan pelatihan berkelanjutan bagi petugas pembinaan agar tujuan pembinaan dapat tercapai secara lebih maksimal.

Evaluasi menggunakan Model CIPP menunjukkan bahwa aspek Context sudah relevan dengan kebutuhan narapidana, tetapi Input berupa jumlah tenaga, fasilitas, dan modul pembelajaran masih belum memadai. Pada aspek Process, metode pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya partisipatif, sementara Product menunjukkan adanya peningkatan religiusitas dan disiplin, tetapi belum berdampak signifikan dalam menurunkan angka residivisme. Studi Abdullah et al. (2021) yang meneliti penerapan Model CIPP di Malaysia menunjukkan bahwa efektivitas pembinaan dapat ditingkatkan melalui desain kurikulum pembinaan yang terstruktur, integrasi teknologi, serta pelibatan pemangku kepentingan eksternal. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menegaskan perlunya reformasi pembinaan kepribadian berbasis evaluasi menyeluruh dan berkesinambungan.

Temuan ini memiliki implikasi penting baik secara akademik maupun praktis. Secara akademik, penelitian ini memperluas literatur tentang evaluasi program pembinaan kepribadian berbasis Model CIPP di Indonesia, sementara secara praktis, temuan ini memberikan dasar bagi penyusunan kebijakan pembinaan yang lebih adaptif dan berbasis bukti. Menurut Haney (2020), program rehabilitasi yang memadukan konseling psikososial, pembinaan spiritual, dan pelatihan keterampilan praktis memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam menyiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi pembinaan di Lapas Kelas IIA Bojonegoro memerlukan pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan dukungan psikologis, pendidikan, dan sosial secara bersamaan.

Kendala dan Faktor Penghambat dalam Implementasi Program Pembinaan

Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi pembinaan kepribadian di Lapas Kelas IIA Bojonegoro adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Rasio antara petugas pembina dan jumlah warga binaan sangat tidak seimbang, di mana satu petugas harus menangani hingga puluhan bahkan ratusan narapidana. Kondisi ini berdampak pada lemahnya proses pendampingan individual dan kurangnya pengawasan terhadap efektivitas kegiatan pembinaan. Studi Taxman et al. (2021) menemukan bahwa rasio petugas yang terlalu tinggi dapat menurunkan efektivitas rehabilitasi karena kurangnya interaksi personal, yang seharusnya menjadi faktor kunci keberhasilan pembinaan. Situasi ini menegaskan perlunya kebijakan redistribusi tenaga pembina atau pelibatan mitra eksternal dalam penyelenggaraan pembinaan.

Selain keterbatasan SDM, masalah sarana dan prasarana menjadi kendala signifikan. Lapas Kelas IIA Bojonegoro masih menghadapi keterbatasan ruang kelas, fasilitas pendidikan, dan peralatan pelatihan yang memadai. Sebagian besar kegiatan pembinaan dilakukan di ruangan serbaguna yang digunakan secara

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Yudha Reza Pratama, Wido Cepaka Warih

bergantian, menyebabkan keterbatasan waktu dan efektivitas pembelajaran. Menurut Baybutt et al. (2020), ketersediaan fasilitas memadai merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan program rehabilitasi karena memengaruhi kualitas pengalaman belajar dan motivasi narapidana. Oleh karena itu, peningkatan investasi pada sarana dan prasarana pembinaan menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas kegiatan.

Keterbatasan modul pembelajaran juga menjadi salah satu penghambat utama. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar materi pembinaan yang digunakan di Lapas Kelas IIA Bojonegoro masih bersifat umum, tidak terstruktur, dan kurang menyesuaikan dengan profil psikologis narapidana. Akibatnya, materi tidak mampu menjawab perbedaan kebutuhan warga binaan yang memiliki latar belakang, tingkat pendidikan, dan tingkat risiko residivisme yang berbeda. Studi Day et al. (2018) menegaskan bahwa kurikulum pembinaan yang personal dan responsif terhadap kebutuhan peserta lebih efektif meningkatkan keberhasilan rehabilitasi. Diperlukan penyusunan modul pembinaan terstandar yang fleksibel, relevan, dan adaptif terhadap kondisi psikososial warga binaan.

Selain persoalan materi, rendahnya partisipasi aktif warga binaan juga menjadi hambatan. Beberapa narapidana mengikuti kegiatan pembinaan hanya sebagai kewajiban formal tanpa benar-benar memahami substansi materi. Minimnya keterlibatan aktif berdampak pada rendahnya internalisasi nilai-nilai moral dan kesadaran hukum yang menjadi tujuan utama pembinaan. Hal ini sejalan dengan temuan Ward dan Maruna (2020) yang menyebutkan bahwa keberhasilan pembinaan sangat bergantung pada keterlibatan peserta, khususnya dalam kegiatan berbasis diskusi, konseling kelompok, dan simulasi praktik sosial. Perlu adanya strategi untuk meningkatkan motivasi internal narapidana, seperti pemberian insentif, penghargaan, dan penguatan pendekatan partisipatif.

Permasalahan lain terletak pada sistem evaluasi dan monitoring program pembinaan yang belum berjalan optimal. Selama ini, keberhasilan program lebih banyak dinilai berdasarkan jumlah kegiatan yang dilaksanakan, bukan pada perubahan perilaku nyata narapidana. Ketiadaan instrumen evaluasi longitudinal membuat Lapas kesulitan memantau perkembangan peserta secara berkelanjutan. Studi Abdullah et al. (2021) di Malaysia menunjukkan bahwa sistem evaluasi berbasis data dan pemantauan jangka panjang dapat meningkatkan efektivitas pembinaan secara signifikan, karena setiap perkembangan perilaku narapidana dapat diukur dan dianalisis secara sistematis.

Selain faktor internal, dukungan eksternal juga masih terbatas. Kolaborasi dengan lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan dunia usaha masih belum optimal. Padahal, keterlibatan pihak eksternal dapat memperkaya metode pembinaan, memperluas akses sumber daya, dan membuka peluang reintegrasi sosial yang lebih efektif. Studi Liu et al. (2022) menegaskan bahwa keberhasilan rehabilitasi narapidana dipengaruhi oleh kolaborasi multipihak yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan memperkuat jaringan kemitraan, pembinaan di Lapas Kelas IIA Bojonegoro dapat mencapai dampak yang lebih luas dan berkelanjutan.

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Yudha Reza Pratama, Wido Cepaka Warih

Kendala lain yang dihadapi adalah kesenjangan regulasi dan implementasi kebijakan. Meskipun Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 telah memberikan pedoman pembinaan narapidana, praktik di lapangan menunjukkan bahwa standar kebijakan seringkali tidak selaras dengan ketersediaan sumber daya dan kapasitas pelaksana. Studi McNeill dan Weaver (2019) mengungkapkan bahwa kesenjangan antara regulasi dan realitas lapangan dapat menurunkan efektivitas rehabilitasi dan menghambat upaya penurunan angka residivisme. Oleh karena itu, harmonisasi kebijakan, dukungan anggaran, dan penyesuaian program menjadi penting untuk mengoptimalkan hasil pembinaan.

Akhirnya, faktor motivasi internal dan kesiapan mental narapidana menjadi aspek yang menentukan keberhasilan pembinaan. Beberapa warga binaan menunjukkan penolakan terhadap kegiatan pembinaan karena trauma, rasa malu, atau rendahnya kepercayaan diri. Studi Haney (2020) menegaskan bahwa pemulihan psikososial narapidana membutuhkan pendekatan holistik yang mengintegrasikan konseling, pembinaan spiritual, dan dukungan sosial. Dengan demikian, peningkatan kualitas pembinaan tidak hanya menitikberatkan pada aspek struktural, tetapi juga harus fokus pada pendekatan psikologis yang memulihkan identitas dan harga diri peserta.

Strategi Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Rekomendasi Kebijakan

Strategi peningkatan pembinaan narapidana di Lapas Kelas IIA Bojonegoro harus dimulai dengan perbaikan kurikulum dan metode pembelajaran. Kurikulum perlu disusun secara sistematis, terstandar, dan responsif terhadap kebutuhan psikososial peserta, termasuk memperhatikan faktor risiko residivisme dan latar belakang individu. Studi Day et al. (2018) menunjukkan bahwa pendekatan pembinaan berbasis asesmen individual dapat meningkatkan efektivitas program karena materi disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan tantangan peserta. Integrasi antara pendidikan agama, pelatihan keterampilan, dan konseling psikososial menjadi kunci untuk memastikan pembinaan bersifat menyeluruh dan aplikatif.

Selain itu, penguatan kapasitas petugas pembinaan menjadi prioritas utama. Lapas perlu menyediakan pelatihan berkelanjutan bagi petugas agar memiliki kompetensi pedagogis, psikologis, dan spiritual dalam mendampingi narapidana. Studi Taxman et al. (2021) menegaskan bahwa kualitas petugas pembinaan merupakan faktor penentu keberhasilan program rehabilitasi karena mereka berperan langsung dalam membentuk lingkungan belajar yang kondusif. Penguatan kapasitas dapat dilakukan melalui workshop, sertifikasi, dan kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk mengembangkan modul pelatihan berbasis penelitian.

Peningkatan fasilitas dan sarana pendukung juga menjadi strategi penting dalam meningkatkan kualitas pembinaan. Lapas perlu menyediakan ruang belajar yang memadai, fasilitas konseling, dan peralatan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Studi Baybutt et al. (2020) menegaskan bahwa fasilitas

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Yudha Reza Pratama, Wido Cepaka Warih

yang representatif berpengaruh langsung terhadap efektivitas pembelajaran dan keberhasilan pembinaan. Dengan adanya dukungan infrastruktur yang memadai, program pembinaan dapat dijalankan lebih optimal dan memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna bagi warga binaan.

Strategi berikutnya adalah pengembangan sistem evaluasi berbasis data. Lapas perlu merancang instrumen evaluasi longitudinal yang dapat memantau perkembangan narapidana secara berkala, baik selama masa hukuman maupun setelah bebas. Studi Abdullah et al. (2021) menunjukkan bahwa penerapan evaluasi berbasis data dan indikator keberhasilan yang terukur dapat meningkatkan akurasi pengambilan keputusan dan meminimalkan kesalahan intervensi. Dengan adanya sistem evaluasi yang sistematis, pembinaan dapat disesuaikan secara real-time berdasarkan kebutuhan aktual narapidana.

Selain perbaikan internal, kolaborasi multipihak harus diperluas. Lapas perlu menjalin kerja sama dengan lembaga keagamaan, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembinaan dan penyediaan peluang kerja pasca-bebas. Studi Liu et al. (2022) menegaskan bahwa kemitraan lintas sektor dapat meningkatkan efektivitas rehabilitasi dan mempercepat proses reintegrasi sosial. Dengan melibatkan lebih banyak aktor eksternal, program pembinaan tidak hanya terbatas pada aspek spiritual, tetapi juga mampu meningkatkan kesiapan ekonomi narapidana setelah keluar dari Lapas.

Selanjutnya, penguatan pendekatan psikososial perlu dilakukan untuk mengatasi masalah trauma, rendahnya kepercayaan diri, dan hambatan mental narapidana. Pendekatan berbasis konseling individu dan kelompok dapat membantu peserta memahami identitas diri, mengelola emosi, dan memulihkan harga diri. Studi Haney (2020) menegaskan bahwa rehabilitasi yang efektif tidak hanya berfokus pada pembentukan keterampilan teknis, tetapi juga pada pemulihan psikologis sebagai fondasi keberhasilan reintegrasi sosial. Integrasi pendekatan psikososial dengan pembinaan spiritual akan memberikan dampak transformatif yang lebih kuat bagi peserta program.

Rekomendasi lain adalah penerapan teknologi digital dalam pembinaan. Sistem e-learning, aplikasi konseling daring, dan platform monitoring berbasis data dapat membantu memperluas akses pendidikan dan mempermudah proses evaluasi. Studi Ferguson et al. (2021) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi dalam pembinaan narapidana meningkatkan efektivitas program, memperkuat motivasi peserta, dan mengoptimalkan manajemen informasi. Penerapan teknologi juga memungkinkan integrasi data antarinstansi sehingga proses reintegrasi sosial dapat dikelola lebih efektif dan transparan.

Akhirnya, dibutuhkan reformasi kebijakan berbasis bukti untuk memastikan pembinaan berjalan lebih optimal. Kebijakan harus selaras dengan praktik terbaik internasional yang menekankan keseimbangan antara pendekatan rehabilitatif dan pencegahan residivisme. Studi Ward, Yates, dan Willis (2021) menegaskan bahwa kebijakan pemasyarakatan berbasis bukti meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, dan keberlanjutan program pembinaan. Oleh karena itu,

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Yudha Reza Pratama, Wido Cepaka Warih

hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk merumuskan strategi nasional pembinaan narapidana yang lebih adaptif, inklusif, dan berorientasi pada reintegrasi sosial berkelanjutan.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa pembinaan kepribadian narapidana di Lapas Kelas IIA Bojonegoro telah memberi dampak positif pada penguatan religiusitas, disiplin, regulasi emosi, dan kesiapan sosial, tetapi efektivitasnya masih terhambat oleh rasio petugas-warga binaan yang timpang, keterbatasan sarana, ketiadaan modul terstandar yang responsif terhadap profil psikososial peserta, rendahnya partisipasi bermakna, serta lemahnya sistem evaluasi longitudinal berbasis data; melalui kerangka Evaluasi CIPP, konteks kebutuhan telah relatif tepat, namun input dan proses memerlukan penguatan signifikan agar produk berupa perubahan perilaku berkelanjutan dan penurunan residivisme dapat tercapai, sehingga diperlukan perbaikan kurikulum dan metode yang partisipatif, peningkatan kapasitas petugas, dukungan fasilitas, penerapan teknologi pembelajaran serta monitoring, perluasan kolaborasi multipihak (lembaga keagamaan, perguruan tinggi, dunia usaha), dan harmonisasi kebijakan berbasis bukti untuk memastikan keberlanjutan hasil pembinaan dan keberhasilan reintegrasi sosial narapidana.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

Abdullah, M., Ismail, H., & Kadir, M. (2021). Evaluating inmate rehabilitation programs using the CIPP model in Malaysian correctional institutions. *Asian Journal of Criminology, 16*(3), 291–309. https://doi.org/10.1007/s11417-021-09356-7

Alfarizi, D. Z., & Jarodi, O. (2023). Implementasi pembinaan kepribadian dalam meningkatkan religiusitas dan kesehatan rohani narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains, 12*(2), 101–115. https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i002.19799

Andrews, D. A., & Bonta, J. (2019). *The psychology of criminal conduct* (6th ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429483648

Arikunto, S. (2002). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Arikunto, S., & Jabar, C. S. A. (2014). *Evaluasi program pendidikan: Pedoman teoritis dan praktis bagi mahasiswa dan praktisi pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Yudha Reza Pratama, Wido Cepaka Warih

Baybutt, M., Chemlal, K., & Dooris, M. (2020). Health-promoting prisons: Theory and practice. *Global Health Promotion, 27*(1), 45–54. https://doi.org/10.1177/1757975920903051

Citriadin, Y. (2020). *Metode penelitian kualitatif: Suatu pendekatan dasar*. Sanabil Creative. http://www.academia.edu/download/35360663/Metode_Penelitian_Kualitatif.docx

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2019). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications. https://doi.org/10.1002/nha3.20258

Day, A., Casey, S., & Ward, T. (2018). Rehabilitation in correctional settings: Approaches and applications. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 62*(4), 897–915. https://doi.org/10.1177/0306624X17742800

Ferguson, L., Meier, K., & Witte, M. (2021). Digital transformation in correctional education: Enhancing learning and rehabilitation. *Education and Information Technologies, 26*(5), 5437–5455. https://doi.org/10.1007/s10639-021-10682-4

Haney, C. (2020). Psychological effects of incarceration and the importance of rehabilitation. *American Journal of Criminal Justice, 45*(2), 233–250. https://doi.org/10.1007/s12103-019-09504-2

Haryoko, S., Bahartiar, & Arwadi, F. (2020). *Analisis data penelitian kualitatif: Konsep, teknik, & prosedur analisis*. Universitas Negeri Makassar.

Hasan, M., Harahap, T. K., Hasibuan, S., Rodliyah, I., Thalhah, S. Z., Cecep, R., … Nur, A. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Tahta Media Group.

K.C., R., & Baral, P. (2023). Applying Context, Input, Process and Product (CIPP) Model for course evaluation. *KMC Journal, 5*(1), 205–218. https://doi.org/10.3126/kmcj.v5i1.52460

Liu, J., Chen, W., & Zhang, X. (2022). Community-based rehabilitation and multiparty collaboration in reducing recidivism. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 66*(7), 765–782. https://doi.org/10.1177/0306624X211021765

Malik Ibrahim, M. (2018). *Penelitian evaluasi bidang pendidikan: Pendekatan kualitatif*. Alauddin University Press.

McNeill, F., & Weaver, B. (2019). *Offender supervision: New directions in theory, research and practice*. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429288373

Mufti, E. A., & Riyanto, O. S. (2023). Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam upaya rehabilitasi narapidana untuk mengurangi tingkat residivisme. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 5*(2), 2425–2438. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.4026

Pandjaitan, P. I., & Widiarty, W. S. (2008). *Pembaharuan pemikiran Dr. Sahardjo mengenai pemasyarakatan narapidana*. CV Ind Hill Co.

Rahman, F. Z. (2022). Analisis program pembinaan kepribadian terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong. *Jurnal Pendidikan dan Konseling, 4*(4), 1349–1358.

Copyright; Yudha Reza Pratama, Wido Cepaka Warih

Ravena, A., Ridha, A. R. M., & Rosmilawati, I. (2024). Pola pembinaan kepribadian dan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang. *Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia SEAN, 2*(1), 35–45.

Sanusi, A. (2019). Evaluasi pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 13*(2), 123–135. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.123-138

Stufflebeam, D. L. (1971). The relevance of the CIPP evaluation model for educational accountability. *Journal of Research and Development in Education, 5*(1), 19–25.

Sukardi. (2014). *Evaluasi program pendidikan dan kepelatihan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Tayibnapis, F. Y. (2000). *Evaluasi program*. Jakarta: Rineka Cipta.

van der Helm, G., Stams, G., & van der Laan, P. (2020). The effects of participation on prison-based rehabilitation. *European Journal of Criminology, 17*(3), 345–366. https://doi.org/10.1177/1477370818792387

Ward, T., & Maruna, S. (2020). Rehabilitation, redemption, and reintegration: A narrative approach to offender change. *Criminal Justice and Behavior, 47*(8), 967–986. https://doi.org/10.1177/0093854820933912

Ward, T., Yates, P., & Willis, G. (2021). Applying evidence-based practice in offender rehabilitation. *Psychology, Crime & Law, 27*(5), 481–498. https://doi.org/10.1080/1068316X.2020.1860235

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Yudha Reza Pratama, Wido Cepaka Warih